

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- A. Latar Belakang**
- B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**
- C. Aspek Strategis**
- D. Permasalahan Utama /Strategic Issued**
- E. Sistematika Penyajian**

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita - cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara

tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

LKj IP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan TAP. MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan

sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2016 Tentang penjabaran Organisasi Dan tata Kelola Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

2. Tugas Pokok

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

3. Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip,

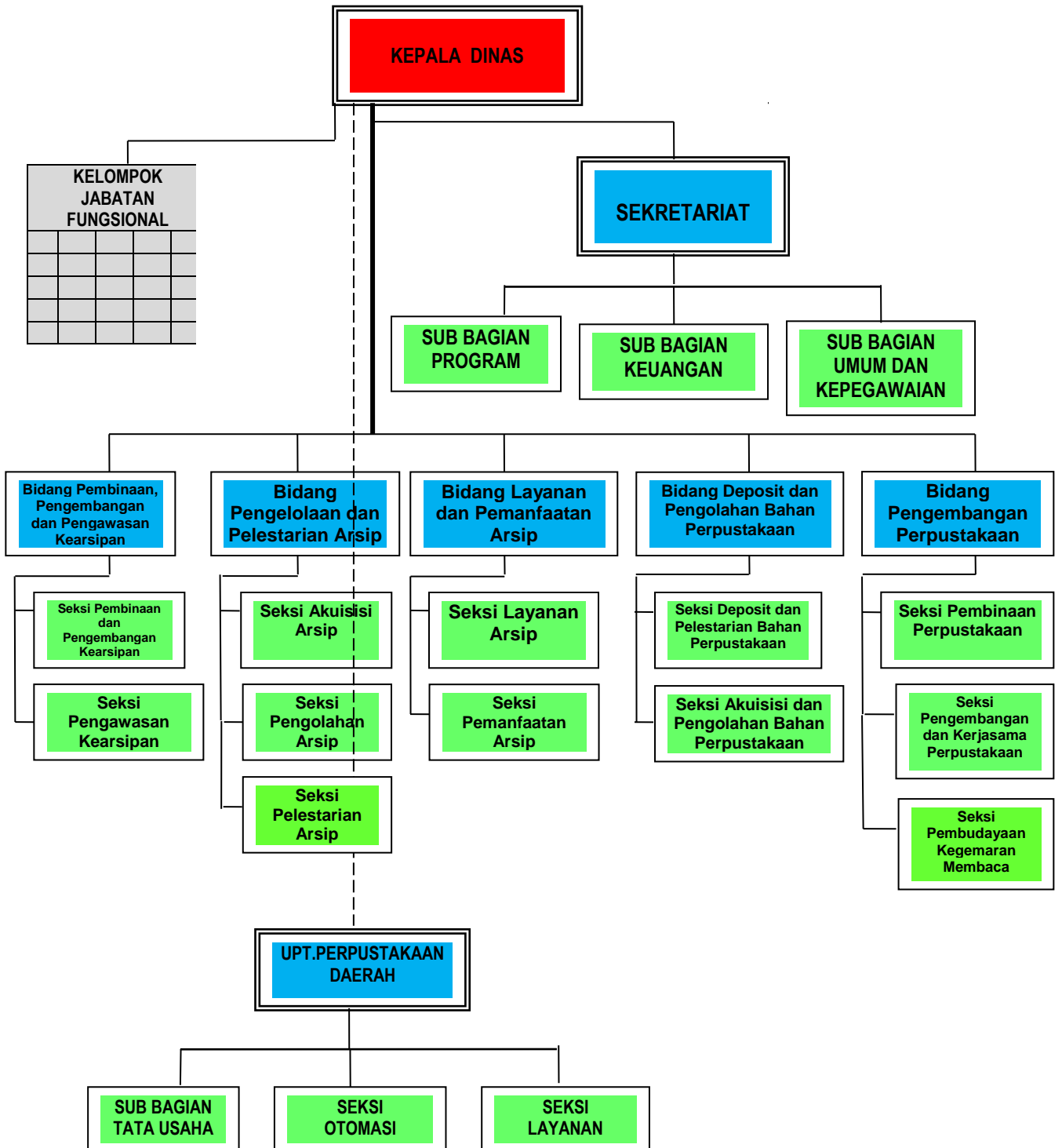
- layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
 - d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan;
 - b. Seksi Pengawasan Kearsipan;
4. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, Membawahkan :
 - a. Seksi Akuisisi Arsip;

- b. Seksi Pengolahan Arsip;
 - c. Seksi Pelestarian Arsip;
5. Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Membawahkan:
- a. Seksi Layanan Arsip;
 - b. Seksi Pemanfaatan Arsip;
6. Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Membawahkan :
- a. Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - b. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
7. Bidang Pengembangan Perpustakaan, Membawahkan :
- a. Seksi Pembinaan Perpustakaan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan;
 - c. Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca;
8. Perpustakaan Daerah; Membawahkan :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Layanan Perpustakaan;
 - c. Seksi Otomasi Perpustakaan.

Struktur Organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah diilustrasikan sebagaimana **Bagan 1.1** sebagai berikut:



Adapun Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov. Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :

Jumlah Pegawai pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini sebanyak 173 orang. Seperti tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan dan Golongan

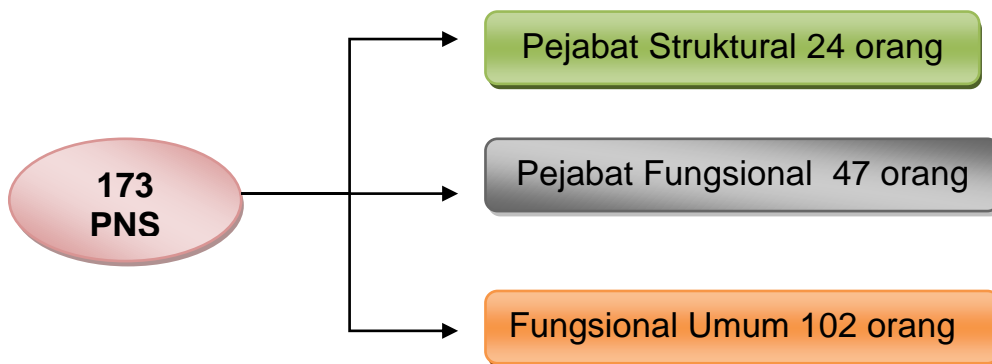
Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	S 2	S 1	D III	SLTA	SLTP	SD	JML
JUMLAH	22	77	16	49	4	5	173

Tingkat Golongan

Gol	Gol.I	Gol.II	Gol.III	Gol. IV	JUMLAH
JUMLAH	4	19	111	39	173

Jumlah PNS sebanyak 173 orang, seperti Bagan 1.2 berikut:



Bagan 1.2 Jumlah PNS

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan memiliki sarana dan prasarana terdiri dari 2 (Dua) Gedung yang menempati dua lokasi yaitu :

Gedung I terletak dilingkungan dengan Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Jl. Setyabudi 201C Sronol Semarang dengan luas tanah 18.107 m².Terdiri dari bangunan gedung kantor seluas 1.366 m² dan gedung depo seluas 7.302,9 m² yang terbagi menjadi Depo barat seluas 4.802,9 m² dan Depo selatan seluas 2.500 m².

Gedung II Kantor Perpustakaan Daerah yang terletak di Jl. Sriwijaya 29-A Semarang dengan luas tanah 3.031 m² dan luas bangunan 2.188 m².

Gedung utama di Jl. Setiabudi digunakan sebagai pusat perkantoran dengan 4 lantai yang di lengkapi dengan ruang office theater kapasitas 40 orang, ruang rapat kapasitas 200 orang di lantai 4, ruang perpustakaan dan otomasi, ruang pengolahan arsip, ruang record center dan ruang aula yang dapat dimanfaatkan untuk resepsi dll dengan memiliki tempat parkir yang cukup luas.

Depo penyimpanan arsip berlantai lima untuk penyimpanan arsip inaktif dan depo berlantai 4 untuk penyimpanan arsip statis, dua depo tersebut dilengkapi fasilitas lift, rak statis, roll o'pack, etraching door glass, data plan dan cold storage.

Kantor Perpustakaan Daerah yang terletak di Jl. Sriwijaya 29-A semarang terdiri dua gedung antara lain gedung lama digunakan untuk layanan publik bagi penyediaan bahan pustaka, lantai satu fasilitas yang dimiliki ruang baca anak, ruang informasi dan pendaftaran anggota, ruang koleksi asing dan referent, ruang penitipan tas dan ruang internet, adapun lantai dua fasilitas yang

dimiliki ruang pelayanan dewasa dan remaja serta ruang perbaikan koleksi perpustakaan, lantai tiga fasilitas yang dimiliki ruang pengolahan, ruang pustakawan, ruang TU, sedangkan gedung baru fasilitas yang dimiliki lift, Ruang deposit dan ruang aula dengan kapasitas 300 orang.

C. ASPEK STRATEGIS

Fungsi strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Fungsi strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2013 sampai dengan 2018.

D. PERMASALAHAN UTAMA /STRATEGIC ISSUED

Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan di Jawa Tengah, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Belum dikelolanya arsip sesuai dengan konteks administrasi/manajemen kearsipan perkantoran sehingga arsip belum menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat; Meningkatkan manajemen pengelolaan kearsipan serta menyediakan informasi arsip yang dapat diakses oleh seluruh

masyarakat dengan mudah tanpa mengesampingkan kerahasiaan informasi mengingat arsip adalah bukti outentik kinerja Pemerintah Daerah;

2. Rendahnya minat baca yang dikarenakan masyarakat berkarakter mendengar, perlunya teknologi informasi, komunikasi serta belum terberdayanya pustakawan dan kebijakan sebagai lembaga yang belum mendukung perpustakaan.

Perlunya pemasyarakatan minat baca, pemberdayaan pustakawan serta kebijakan yang mendukung perpustakaan;

3. Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana dan penguasaan teknologi informasi

Ketersediaan sarana prasarana dan penguasaan teknologi informasi diperlukan dalam mengelola kearsipan dan perpustakaan

guna meningkatkan kualitas layanan, namun sampai saat ini mayoritas arsiparis dan pustakawan masih terbatas dalam menguasai teknologi informasi secara baik;

4. Rendahnya minat wisata edukasi dan budaya di Jawa Tengah, sehingga perlu optimalisasi wisata edukasi dan budaya bagi pelajar dan masyarakat menuju masyarakat sadar arsip dan perpustakaan;

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2017 tersebut dibandingkan

dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, aspek strategis, , serta permasalahan utama (*strategic issued*) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 meliputi RPJMD 2013 - 2018, Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran) yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dan menyampaikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RPJMD Tahun 2013 – 2018
- B. Rencana Strategi Tahun 2013 – 2018
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah diberikan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;

- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- a. RPJMD 2013 – 2018
- b. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2013 – 2018
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

A. RPJMD Tahun 2013 – 2018

a. Visi

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2013 – 2018 berangkat dari landasan visi : **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI ” Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi ”**, dengan bingkai kerangka ideologi trisakti Bung Karno. Dengan mengacu pada Visi Provinsi Jawa Tengah, maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan memiliki Visi sebagai berikut:

”Arsip Dan Perpustakaan Sebagai Sumber Informasi, Dan Ilmu Pengetahuan Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut Arsip Dan Perpustakaan Sebagai Sumber Informasi mengandung pengertian bahwa arsip pada dasarnya merupakan rekaman informasi (*recorded information*) yang penting sehingga masyarakat menyadari betapa pentingnya arsip sehingga dapat

didaya gunakan sebagai sumber informasi baik untuk pengambil keputusan (arsip dinamis) maupun kepentingan kesejarahan (arsip statis). Perpustakaan juga sebagai sumber informasi dan pendidikan sepanjang hayat dalam upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

Arsip Dan Perpustakaan yang berkualitas dan berdaya saing mengandung makna bahwa arsip yang disimpan, dikelola dan dilayanan memiliki nilai guna dalam penyelenggaraan pemerintahan serta bukti otentik dari hasil pembangunan. Sedangkan Perpustakaan mengelola bahan perpustakaan yang terbaru dan berkualitas guna mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan pemustaka yang mana pada gilirannya nanti menjadi masyarakat yang cerdas.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 tersebut, maka perlu mengaktualisasi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 7 (tujuh) misi :

Misi 1: Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;

Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan pengangguran;

- Misi 3:** Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, Mboten Korupsi Mboten Ngapusi;
- Misi 4:** Memperkuat kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
- Misi 5:** Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajad Hidup Orang Banyak;
- Misi 6 :** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
- Misi 7:** Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (UU No. 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai nilai yang diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Gubernur, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Arsip dan Perpustakaan;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan;
3. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan perpustakaan.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terdapat pada Misi ke 6 (enam) dalam Pencapaian Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dalam Visi : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*” tercantum dalam **Tabel 2.1**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi yang bersih, jujur dan transparan "Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi"	Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat	Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat	Jumlah Pengunjung perpustakaan provinsi per tahun	732.050	768.653	807.085	847.439	889.811	934.302
			Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan provinsi	203.126	213.282	223.946	235.144	246.901	259.246
			Jumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan	781	851	921	991	1.061	1.131

B. Rencana Strategi Tahun 2013 – 2018

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen kerja untuk masa kerja lima tahun ke depan. Dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerja yang ada sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yaitu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja pemerintah). Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 berikut aturan pelaksanaannya, maka setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 sebagai operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah:

1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ;
2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan LKj IP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
4. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan khususnya di bidang kearsipan dan perpustakaan.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing masing misi.

Tabel 2.2. Misi - Tujuan

No	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan kualitas SDM Arsip dan Perpustakaan;	Meningkatkan kompetensi SDM pengelola Kearsipan dan Perpustakaan;
2.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan;	Meningkatkan kemudahan akses informasi arsip dan perpustakaan untuk masyarakat;
3.	Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi;	Meningkatkan pengelolaan sistem kearsipan dan perpustakaan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi;
4.	Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan perpustakaan	Memberdayakan lembaga arsip dan perpustakaan;

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tenaga arsiparis/pengelola kearsipan dan pustakawan/ pengelola perpustakaan;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarpras kearsipan dan perpustakaan;

3. Meningkatnya otomasi kearsipan dan perpustakaan SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota;
4. Meningkatnya pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

c. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan tehnik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan kebijakn dan program program. Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut :

Tabel 2.3. Tujuan - Strategi

No	Tujuan	Strategi
1.	Meningkatkan kompetensi SDM pengelola Kearsipan dan Perpustakaan;	Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM Kearsipan dan Perpustakaan;
2.	Meningkatkan kemudahan akses informasi arsip dan perpustakaan untuk masyarakat;	Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan;
3.	Meningkatkan pengelolaan sistem kearsipan dan perpustakaan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi;	Meningkatkan akses informasi kearsipan dan perpustakaan melalui pengembangan sistim otomasi;
4.	Memberdayakan lembaga arsip dan perpustakaan;	Meningkatkan jumlah lembaga pemerintah dan swasta yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dengan baik;

d. Indikator Kinerja Utama

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 dan Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2013 – 2018 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola kearsipan dan perpustakaan.		
Meningkatnya kualitas tenaga arsiparis/ pengelola kearsipan dan pustakawan/ pengelola perpustakaan	1) Jumlah tenaga arsiparis /pengelola kearsipan yang kompeten	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah Sumber Daya Aparatur (SDA) kearsipan di Jawa Tengah yang telah memiliki kompetensi dalam pengelolaan kearsipan secara baik dan benar. • Formulasi Pengukuran: Jumlah SDA kearsipan yang telah mengikuti pendidikan kearsipan. • Tipe Perhitungan: Kumulatif. • Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
	2) Jumlah tenaga pustakawan /pengelola perpustakaan yang kompeten	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di dalam mengelola per pustakaan. • Formulasi Pengukuran: Jumlah pengelola perpustakaan yang telah mengikuti pendidikan perpustakaan • Tipe Perhitungan: Kumulatif. • Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatkan kemudahan akses informasi arsip dan perpustakaan untuk masyarakat.		
2.1 Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi arsip dan perpustakaan	1) Jumlah pengguna arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk memantau jumlah pengguna arsip Daerah Provinsi Jateng pada tahun berjalan. • Formulasi Pengukuran: Jumlah pengguna arsip pada tahun berjalan.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	2) Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan: Kumulatif. • Sumber Data: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memantau perkembangan jumlah pengunjung/ pemustaka di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam satu tahun. • Formulasi Pengukuran : Jumlah pengunjung / pemustaka Perpustakaan Daerah Jawa Tengah pada tahun berjalan. • Tipe Perhitungan : Kumulatif. • Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
2.1 Meningkatnya otomasi kearsipan dan perpustakaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.	1. Prosentase arsip yang sudah dialih media	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk me mantau perkembangan jumlah arsip yang sudah dialih media di Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam satu tahun. • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah arsip yang sudah di alih media}}{\text{Jumlah Arsip keseluruhan pada tahun berjalan}} \times 100 \%$ • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif. • Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
	2. Prosentase bahan pustaka yang sudah dialihmedia	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk me mantau perkembangan jumlah bahan pustaka yang sudah dialihmedia di Badan Arsip dan Perpustakaan selama satu tahun. • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah bahan pustaka yang sudah dialih media}}{\text{Jumlah bahan pustaka keseluruhan pada tahun berjalan}} \times 100 \%$ • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif. • Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Memberdayakan lembaga arsip dan perpustakaan.		
Meningkatnya kelembagaan kearsipan dan perpustakaan	1) Jumlah SKPD/UPTD/LKD yang mengelola arsip dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk me mantau perkembangan jumlah Desa/Kelurahan yang mengelola arsip dengan baik. • Formulasi Pengukuran :

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<p>Jumlah Desa/Kelurahan yang mengelola arsip dengan baik pada tahun bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif. • Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
	2) Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memantau perkembangan jumlah perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan • Formulasi Pengukuran : Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan pada tahun bersangkutan. • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif. • Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tercantum pada

Tabel 2.5

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kompetensi SDM pengelola kearsipan dan perpustakaan	Meningkatnya kualitas tenaga arsiparis/ pengelola kearsipan dan pustakawan/ pengelola perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Sumber Daya Aparatur (SDA) kearsipan yang telah mengikuti bintek. 2. Jumlah sumberdaya Manusia perpustakaan yang telah mengikuti bintek 	250	200	200	200	200
				105	105	105	105	105

2	Meningkatkan kemudahan akses informasi arsip dan perpustakaan untuk masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarpras kearsipan dan perpustakaan	1. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan provinsi	213.282	223.946	235.144	246.901	259.246
3	Meningkatkan pengelolaan sistem kearsipan dan perpustakaan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi	Meningkatnya otomasi kearsipan dan perpustakaan SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	1. Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun	768.653	807.085	847.439	889.811	934.302
			2. Jumlah pengunjung/pengguna arsip	2.200	2.310	2.425	2.546	2.656
4	Memberdayakan lembaga arsip dan perpustakaan	Meningkatnya pengelolaan kearsipan dan perpustakaan	1. Jumlah arsip yang di lestarian	3000	3500	4000	4500	5000
			2. Jumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan	851	921	991	1.061	1.131

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang *seharusnya* terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang di rencanakan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan telah melaksanakan 12 (Dua belas) program 67 (enam puluh tujuh) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 39.997.997.960.000,- terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 14.442.275.000; Belanja tidak Langsung Rp. 25.555.685.000; dan APBN sebesar Rp. 2.169.778.000,-. Terdiri dari Kearsipan Rp. 569.876.000,- dan Perpustakaan Rp. 1.599.902.000,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dengan Gubernur Tahun 2017, secara lengkap tercantum pada **Tabel 2.6**.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas tenaga arsiparis / pengelola kearsipan dan pustakawan/pengelola perpustakaan	1. Jumlah Sumber Daya Aparatur (SDA) Kearsipan Yang Telah mengikuti Bintek	250 orang	250 orang
	2. Jumlah sumber daya Manusia Perpustakaan yang telah mengikuti Bintek	105 orang	140 orang
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Sarpras Kearsipan dan Perpustakaan	1. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah provinsi	246.901 eksemplar	281.424 eksemplar
Meningkatnya Otomasi Kearsipan dan Perpustakaan SKPD Provinsi	1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Per Tahun	889.811 orang	3.117.285 orang
	2. Jumlah Pengunjung / Pengguna Arsip	3.100 orang	5.538 orang
Meningkatnya pengelolaan Kearsipan Dan perpustakaan	1. Jumlah Arsip Yang di Lestarikan	4.500 berkas	33.324 berkas
	2. Jumlah Perpustakaan Yang Memenuhi Standar Perpustakaan	105 unit	105 unit

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran)

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel. 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja LKjIP

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2017, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dan Rencana Strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, setidaknya terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas tenaga arsiparis/pengelola kearsipan dan pustakawan/ pengelola perpustakaan.

b. Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarpras Kearsipan dan Perpustakaan.

c. Sasaran 1.3 : Meningkatnya Otomasi Kearsipan dan Perpustakaan SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.

d. Sasaran 1.4 : Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Dan perpustakaan.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 s.d. 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja seperti **tabel 3.2** sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2016	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Meningkatnya kualitas tenaga arsiparis/pengelola kearsipan dan pustakawan/ pengelola perpustakaan.	1. Jumlah Sumber Daya Aparatur (SDA) Kearsipan yang telah mengikuti Bintek	250 org	250 org	100%	100%	1.050 org
	2. Jumlah sumber daya Manusia Perpustakaan yang telah mengikuti Bintek	105 org	140 org	133%	133%	525 org

2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarpras Kearsipan dan Perpustakaan	1. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah provinsi	246.901	281.424	113,98%	113,424%	259.246
3. Meningkatnya Otomasi Kearsipan dan Perpustakaan SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Per Tahun	889.811	3,117,285	350,33%	122 %	934.302
	2. Jumlah Pengunjung/ Pengguna Arsip Provinsi	3,100	5,538	178,65%	238%	2.656
4. Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Dan perpustakaan.	1. Jumlah Arsip Yang di Lestarkan	4.500	33.324	740,53%	250%	5.000
	2. Jumlah Perpustakaan Desa Yang Memenuhi Standar Perpustakaan	105	1051	100%	100%	1.131

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1.1. Meningkatnya kualitas tenaga arsiparis/pengelola kearsipan dan pustakawan/ pengelola perpustakaan.

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kualitas tenaga arsiparis/pengelola kearsipan



"Bintek Pengelola Perpustakaan"

dan pustakawan/ pengelola perpustakaan dengan indikator Jumlah Sumber Daya Aparatur (SDA) Kearsipan yang telah mengikuti Bintek terealisasi 100% sehingga di katagorikan **Baik**, sedangkan indikator Jumlah sumber daya Manusia Perpustakaan yang telah mengikuti Bintek melebihi target dengan realisasi 133% sehingga dikatagorikan **sangat Baik**.

Naiknya capaian kinerja Tahun 2016, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh Meningkatnya jumlah sumber daya Manusia kearsipan dan Perpustakaan yang telah mengikuti Bintek

yang mencapai 133%, di karenakan banyak kebutuhan dari Kab/Kota yang mengirimkan calon peserta Bintek Pengelola Kearsipan dan Perpustakaan.

Bidang Kearsipan, sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan **Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pembinaan Kearsipan;
2. Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan;
3. Kegiatan Peningkatan SDA Bidang Kearsipan;
4. Kegiatan Evaluasi Kearsipan;

Bidang Perpustakaan dengan **Program Peningkatan SDM Perpustakaan**, Kegiatannya antara lain :

1. Kegiatan Bintek Pengelola Perpustakaan;
2. Kegiatan In House Training;
3. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Perpustakaan;

Sasaran 1.2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarpras Kearsipan dan Perpustakaan.



Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarpras Kearsipan dan Perpustakaan dengan indikator Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah provinsi melebihi target

dengan realisasi 113,98% sehingga dikatagorikan **Sangat Baik**.

Naiknya capaian kinerja Tahun 2017, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh Meningkatnya jumlah koleksi buku

yang tersedia di perpustakaan Daerah provinsi yang mencapai 113.98%, hal itu dikarenakan kebutuhan pemustaka yang terus meningkat sehingga di butuhkan buku-buku yang Upto date harus terpenuhi. Keberhasilannya tidak terlepas dari dilaksanakannya beberapa program antara lain :

Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan,
Kegiatannya antara lain:

1. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan;
2. Kegiatan Penerbitan Literatur Sekunder dan Pelaksanaan Karya Cetak Karya Rekam;
3. Kegiatan Pelestarian bahan Pustaka Koleksi Deposit;
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perpustakaan;
5. Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan Kelling;



"Kepala Dinas Arpus Prov.Jateng meninjau Stand Badan Arpus pada Pameran Jateng Fair 2016"

Sasaran 1.3. Meningkatnya Otomasi Kearsipan dan Perpustakaan SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota

Sementara itu untuk capaian kinerja Meningkatnya Otomasi Kearsipan dan Perpustakaan SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota dengan dua indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Per Tahun mencapai target 350.33% dan Jumlah Pengunjung/ Pengguna Arsip Provinsi terealisasi 178.65% sehingga di katagorikan **Sangat Baik**

Naiknya capaian kinerja Tahun 2017, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Per Tahun mencapai target 350.33% dan Jumlah Pengunjung/ Pengguna Arsip provinsi terealisasi 178.65% hal itu di karenakan promosi arsip dan perpustakaan baik melalui media maupun pameran yang berkelanjutan, serta kerjasama dengan pihak lain baik negeri maupun swasta. Keberhasilannya tidak terlepas dari dilaksanakannya :

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi,

kegiatannya yaitu Pengembangan Layanan Informasi Kearsipan;

Program Pengembangan Budaya Baca, Kegiatannya antara lain :

1. Kegiatan Pengembangan Otomasi Perpustakaan daerah;
2. Kegiatan Promosi Minat Baca;
3. Kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan Daerah;
4. Kegiatan Pengembangan Pojok Baca;
5. Kegiatan Buletin Perpustakaan;
6. Kegiatan Ekspo Perpustakaan daerah;
7. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kemitraan Dibidang Perpustakaan;
8. Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Daerah;

Sasaran 1.4. Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Dan Perpustakaan.

Sedangkan sasaran Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Dan perpustakaan dengan indikator Jumlah arsip yang dilestarikan terealisasi 740.53% sehingga dikategorikan **Sangat Baik** dan indikator Jumlah Perpustakaan Desa Yang Memenuhi Standar Perpustakaan terealisasi 100% sehingga dikategorikan **Baik**.

Naiknya capaian kinerja Tahun 2017, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh meningkatnya jumlah arsip yang

dilestarikan terealisasi 740.53% hal itu dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip dan banyak SKPD yang menyerahkan arsipnya untuk dilestarikan. Keberhasilannya tidak terlepas dari dilaksanakannya beberapa program antara lain :

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, Kegiatannya antara lain :

1. Kegiatan Akuisisi Dan penilaian Arsip di Jawa Tengah;
2. Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Kearsipan;
3. Kegiatan Program Arsip Vital;
4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Informasi Arsip;
5. Kegiatan Penyimpanan Dan Pelestarian Arsip Statis;
6. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kearsipan;
7. Kegiatan Digitalisasi Arsip Statis;

Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat, Kegiatannya Pemasyarakatan Kearsipan;

Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan, Kegiatannya antara lain :

1. Kegiatan Evaluasi Layanan Perpustakaan;
2. Kegiatan Pengembangan Perpustakaan;
3. Kegiatan Akreditasi Perpustakaan;
4. Kegiatan Pengkajian Pengembangan Bidang Perpustakaan;
5. Kegiatan Up Dating Bidang Perpustakaan;
6. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perpustakaan Dan Kepustakawanan;
7. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan;

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengisi kekurangan tenaga Arsiparis / Pengelola kearsipan Dan Pustakawan / Pengelola Perpustakaan adalah melalui :

1. Mengoptimalkan tenaga pengelola baik Arsip maupun perpustakaan
2. Usulan Ke BKD Provinsi untuk kebutuhan tenaga arsiparis dan pustakawan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1 sampai dengan 1.4, adalah sebesar Rp. 36,526,349,315,- 39.078.363.528 atau 97.70 % dari total pagu sebesar Rp. 39,997.960,000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp. 919.596.472 dari Pagu yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian pada :

C. Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2017, didukung dengan Anggaran sebesar Rp 42.167.738.000 Anggaran tersebut bersumber dari APBD sebesar Rp. 39.997.960.000,- dan APBN sebesar Rp. 2.169.778.000,- , secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 25.555.685.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp.10.971.945.000,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp.2.771.530.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran seperti **Tabel 3.3** sebagai berikut :

Sasaran (1)	Program (2)	Anggaran (3)	Realisasi (4)	% Realisasi (5)
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.200.375.000	4.068.288.921	96.86
Meningkatnya sarana prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.590.130.000	1.576.243.500	99.13
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	37.500.000	37.500.000	100

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	239.625.000	237.152.150	98.97
Meningkatkankualitas pengelolaan kearsipan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1.373.600.000	1.359.726.720	98.99
Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian arsip	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1.102.000.000	1.059.071.950	96.10
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip	Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat	457.700.000	51.385.000	99.65
Meningkatkan layanan pada masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	120.000.000	119.672.500	99.73
Meningkatnya budaya masyarakat jawa tengah	Program Pengembangan Budaya Baca	2.525.325.000	2.483.119.290	98.33
Meningkatnya SDM perpustakaan	Program Peningkatan SDM Perpustakaan	200.000.000	194.030.800	97.02
Meningkatnya sarana prasarana perpustakaan	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	2.045.020.000	1.938.005.300	94.77
Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan	Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan	551.000.000	538.660.000	97.76

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2017, apabila dibandingkan Tahun 2016 maka terjadi peningkatan sebesar 5.43%, Tahun 2017 sebesar 97.70%, Tahun 2016 sebesar 92,27%.

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

B. Saran

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang kearsipan dan perpustakaan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov. Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

- a. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai (97.70%) untuk semua kegiatan atau dilaksanakan dengan efektif dan efisien
- b. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai banyak diatas 100%,(katagori sangat baik) dengan rincian 1. Meningkatnya jumlah sumber daya Manusia Perpustakaan yang telah mengikuti Bintek yang mencapai 133%;

2. Meningkatnya jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah provinsi yang mencapai 113.98%,; 3. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Per Tahun mencapai target 350,33% dan Jumlah Pengunjung/Pengguna Arsip Provinsi terealisasi 178.65%; 4. Meningkatnya Jumlah arsip yang dilestarikan terealisasi 740.53%;
- c. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah hanya bisa menyerap Rp. 39.078.363.528; kurang dari dana yang dianggarkan sebesar RP. 39,997.960,000;. Hal ini berarti terjadi efisiensi Rp. 919.596.472 dari anggaran yang disediakan dikarenakan sisa lelang dan pemanfaatan aset Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan;
- d. Target Pendapatan Rp. 80.000.000; realisasi terpenuhi sebanyak Rp. 83.374.690,- (104,22%) dikarenakan meningkatnya pengunjung kearsipan dan perpustakaan untuk foto copy informasi yang dibutuhkan masyarakat dan meningkatnya pengunjung kantin.

B. Saran

1. Mengadakan penambahan Koleksi yang Up To Date dan melengkapi peralatan IT serta menambah jam Layanan Kearsipan dan Perpustakaan sehingga tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi tercukupi
2. Perlu peningkatan SDM fungsional Arsiparis dan Pustakawan mengingat semakin kompleksnya Tupoksi dibidang kearsipan dan perpustakaan yang di tangani untuk mewujudkan layanan prima kepada masyarakat.

3. Perlu dilakukan penambahan sarana prasarana di bidang kearsipan maupu perpustakaan guna mendukung pelayanan kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat
4. Adanya kerjasama bidang kearsipan dan perpustakaan dengan pihak Swasta maupun Negeri untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kearsipan maupun perpustakaan

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2017 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih

Semarang, 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

MUHAMMAD MASRIFI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680517 198908 1 002